**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau lebih umum disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. (Prasetya, 2017). Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi Hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia (Badan Pusat Statistik, 2013)

 Indonesia tidak serta merta langsung menjadi sebuah negara dengan 270 juta penduduk, memiliki pemerintahan dan menjalankan sistem demokrasi ataupun menjalin suatu hubungan dengan negara lain seperti sekarang, ada perjuangan dan sejarah dibalik berdirinya Indonesia sebelum 17 Agustus 1945.

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua Kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok

Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. (Central Intelligence Agency, 2019)

Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam berbagai bidang, misal dalam bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan. (PresidenRI, 2017). Masing-masing dari hal tersebut dituangkan dalam beberapa kesepatakan seperti pertukaran pelajar serta transfer pengetahuan yang dilakukan pemprov jabar dan pemerintahan Malaysia di bidang kerjasama Pendidikan. (Tempo.co, 2018) Ekspor beras dari Indonesia ke Malaysia yang diharapkan dapat mencapai 150 ribu ton dalam bentuk kerjasama dalam bidang Perdagangan serta Pengaturan perbatasan yang diatur dalam Border Trade Agreement dalam bentuk kerjasama perbatasan atau pertahanan dan keamanan. (Agustiyanti, 2017)

Di masa mendatang, kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan energy diharapkan dapat lebih berkembang yang dapat meningkatkan perekonomian di kedua negara, serta bisa membuka lebih lebar peluang kerja yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah intensitas jumlah pengangguran yang selalu menjadi momok masalah dewasa ini. Di bidang sosial pun kedua negara ini juga sepakat untuk membangun kerjasama khususnya dibidang ketenagakerjaan. Kedua negara ini sepakat untuk mengelola kerjasama ini lebih baik lagi melalui kebijakan serta langkah-langkah yang akan di tempuh sesuai dengan kesepakatan kedua negara ini. Selanjutnya kerjasama ini akan di tindak lanjuti ditingkat menteri, organisasi, termasuk diantaranya kalangan dunia usaha baik usaha milik swasta maupun negara. (Zein, 2019)

Selain Kerjasama dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia juga kerap kali terlibat dalam sebuah konflik, salah satunya adalah polemik perebutan wilayah di kawasan perbatasan. Permasalahan ini sudah muncul sejak 1973, karena perbedaan pendapat kedua negara tentang batas wilayah masing-masing negara. permasalahan terletak pada perbedaan interpretasi kedua negara terhadap peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda-Inggris, sesuai dengan Konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. ([Azanella](https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/20372561/hubungan-malaysiaindonesia-masih-terganjal-perkara-batas-negara), 2018)

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. (Kumpulan Referensi Dunia, 2019)

Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.004 km melewati Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara(sebelum diterbatikannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, masih masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur). (Hadiwijoyo, 2018:103). Perbatasan maritim di Selat Malaka umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara dasar benua Indonesia dan Malaysia, membentang ke arah selatan dari perbatasan Malaysia–Thailand hingga ke titik pertemuan perbatasan Malaysia–Singapura. Sebagian perbatasan ini ditetapkan melalui Perjanjian Perbatasan Landas Benua pada tahun 1969 dan Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut pada 1970. Perbatasan landas benua antara Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan juga ditarik di sepanjang garis dasar benua antara kedua negara berdasarkan perjanjian 1969. (Priangani, Oktavian and Budiana, 2009)

Terdapat sejumlah transportasi laut yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, sebagian besarnya antara Sumatra dan Semenanjung Malaysia, dan sebagian kecil antara Kalimantan Utara dan Sabah. Satu-satunya perlintasan darat yang menghubungkan kedua negara ini terdapat di Entikong (Indonesia)/Tebedu (Malaysia). Perbatasan Indonesia–Malaysia, baik darat atau laut, memiliki celah yang menyebabkan masuknya sejumlah besar pekerja imigran ilegal dari Indonesia ke Malaysia. (Kumpulan Referensi Dunia, 2019)

Sengketa permasalahan Indonesia – Malaysia merupakan sengketa yang sudah ada sejak lama ditandai dengan upaya proses demarkasi ( penegasan ) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1975. Proses demakrasi perbatasan Indonesia – Malaysia hingga tahun 2000 sudah diselesaikan sepanjang 2.004 ( Sektor Timur 371 KM dan Sektor Barat 1.633 KM ) dari total 2.019 KM perbatasan antara Indonesia – Malaysia. Walaupun demikian masih ada beberapa kawasan/titik yang masih di sengketakan baik oleh salah satu Negara maupun keduanya. Masih terdapat 9 segmen batas yang belum selesai (Data September 2018), dan dikelompokkan dalam *Outstanding Boundary Problems (OBP) :*

1. Sektor Timur : Pulau Sebatik, C500-C600, B2700-B3100, Sungai Semantipal, dan Sungai Sinapad.
2. Sektor Barat : Tanjung Datu, Gunung Raya, Sungai Buan, D.400 (LIPI, 2019)

Sengketa masalah perbatasan kembali muncul ke permukaan setelah klaim Malaysia atas wilayah 3 desa di kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, diantaranya Desa Sinapad, Desa Sinokod dan Desa Simantipal pada tahun 2014 lalu(Procal.co, 2014) Hal ini berkaitan dengan sengeketa permasalahan perbatasan di Sungai Simantipal dari tahun 1973, ketika terjadi perbedaan perspektif tim pengukuran Indonesia – Malaysia dan klaim Malaysia atas wilayah Sungai Simantipal.

Hal ini diharapkan selesai dengan di tandatanganinya *MoU forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary* pada tanggal 10 Oktober 2018 kemarin, Indonesia – Malaysia sepakat setelah adanya persetujuan agar 2 titik yaitu Sungai Simantipal dan titik C500-C600 tidak menjadi OBP lagi, kerjasama yang dilakukan dan telah ditanda tangani pun menjadi titik cerah setelah sekian lama titik ini menjadi permasalahan yang baru selesai.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

**KERJASAMA INDONESIA - MALAYSIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERBATASAN DI SUNGAI SIMANTIPAL**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerjasama Indonesia – Malaysia dalam pengelolaan perbatasan?
2. Bagaimana permasalahan perbatasan disungai simantipal ?
3. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan perbatasan di Sungai Simantipal antara Indonesia - Malaysia?
4. **Pembatasan Masalah**

Melihat luasnya permasalahan yang ditemukan, maka penulis perlu membatasi masalah yaitu pada akar permasalahan perbatasan Indonesia - Malaysia dengan adanya Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang berupa kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia – Malaysia dari tahun 2013 - 2018.

1. **Perumusan Masalah**

Agar mempermudah dalam menganalisa permasalahan berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut: **“Bagaimana penyelesaian permasalahan perbatasan disungai simantipal oleh Indonesia - Malaysia?”**

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Setelah diuraikan latar belakang dan identifikasi masalah, ada pun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat penyelesaian permasalahan perbatasan di sungai simantipal sehingga memakan waktu yang sangat lama.
2. Untuk mengetahui program kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam penyelesaian permasalahan perbatasan di sungai simantipal.
3. Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan setelah kerjasama atas penyelesaian permasalahan ditanda tangani.

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk melatih cara berpikir secara sistematis dalam meneliti dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kerjasama indonesia - malaysia dalam menyelesaikan masalah perbatasan di sungai simantipal.
4. Diharapkan dapat menambah peneliti lain yang tertarik akan masalah dan memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan masukan atau sebagai bahan perbandingan.
5. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang kerjasama internasional.
6. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian kesarjanaan Strata Satu (s1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Indonesia.